

Memaknai Komunikasi Digital Secara Etis: Belajar dari Pemikiran Jürgen Habermas

Siti Rohmah Soekarba
Trassanda Scudetto Widestomo Putra

ABSTRAK: Artikel ini merekonstruksi perangkat konseptual Jürgen Habermas—tindakan komunikatif, empat klaim validitas (kebenaran, ketepatan normatif, ketulusan, keterpahaman), serta etika wacana—untuk memaknai komunikasi digital yang dimediasi algoritme secara etis. Dengan Metode Rekonstruksi–Transendental Dialektis yang dipadukan dengan pembacaan hermeneutik, analisis wacana kritis, dan studi kasus instrumental, kajian ini menyusun jembatan dari teori ke praktik melalui tiga keluaran utama: (1) matriks evaluasi “Habermasian” yang menerjemahkan empat klaim validitas menjadi indikator operasional dan dapat diaudit; (2) prototipe normatif berbasis eksperimen pikiran/fiksi berguna guna menguji konsistensi etis rancangan antarmuka dan kebijakan *platform*; dan (3) pedoman desain–tata kelola bebas dominasi yang menormakan pemberian serta penuntutan alasan, jalur banding substantif, kurasi berbasis justifikasi, dan penjelasan publik atas keputusan algoritmik. Penerapan pada perdebatan digital mengenai kebijakan tarif “resiprokal” AS–Indonesia menunjukkan bahwa penataan prosedural—format alasan minimal, pemisahan kanal fakta–kebijakan, moderasi beralasan dengan jalur banding—mampu mengalihkan diskursus dari metrik keterlibatan menuju evaluasi alasan yang terbuka, sekaligus mereduksi kecenderungan kolonisasi dunia kehidupan oleh rasionalitas sistem. Kontribusi utama artikel ini ialah operasionalisasi murni-Habermas bagi ekosistem digital kontemporer, yang memperkuat legitimasi diskursif melalui prosedur inklusif, transparan, dan revisibel. Implikasi praktisnya mencakup kerangka audit mutu komunikasi yang dapat diadopsi peneliti, pendidik, pengelola *platform*, dan pembuat kebijakan untuk memajukan *Verständigung* dalam ruang publik digital.

KATA KUNCI: komunikasi digital, etika, Habermas, tindakan komunikatif, wacana

ABSTRACT: *This article reconstructs Jürgen Habermas's conceptual apparatus—communicative action, four validity claims (truth, normative correctness, sincerity, comprehensibility), and discourse ethics—to ethically interpret algorithmically mediated digital communication. Using the Transcendental Dialectical Reconstruction Method combined with hermeneutic reading, critical discourse analysis, and instrumental case studies, this study builds a bridge from theory to practice through three main outputs: (1) a “Habermasian” evaluation matrix that translates the four validity claims into operational and auditable indicators; (2) a thought-experiment/fiction-based normative prototype useful for testing the ethical consistency of interface designs and platform policies; and (3) a domination-free design-governance guideline that normatively promotes reason-giving and demand-based approaches, substantive appeals, justification-based curation, and public explanation of algorithmic decisions. Application to the digital debate over the US-Indonesia “reciprocal” tariff policy demonstrates that procedural arrangements—a minimal reason format, a separation of fact-policy channels, reasoned moderation with an appeals path—can shift discourse from engagement metrics to open evaluation of reasons, while simultaneously reducing the tendency for the lifeworld to be colonized by system rationality. This article's primary contribution is a purely Habermas-based operationalization for the contemporary digital ecosystem, which strengthens discursive legitimacy through inclusive, transparent, and revisable procedures. Practical implications include a communication quality audit framework that researchers, educators, platform managers, and policymakers can adopt to advance *Verständigung* in the digital public sphere.*

KEYWORDS: *digital communication, ethics, Habermas, communicative action, discourse.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Ruang publik digital menjadi arena utama pembentukan opini dan interaksi sosial, tetapi keterbukaan platform juga memunculkan problem etis seperti polarisasi, serangan personal, dan penyebaran informasi bermasalah yang dipicu logika perhatian. Karena itu, komunikasi digital perlu dibaca bukan hanya sebagai pertukaran pesan, melainkan sebagai praktik sosial yang membawa konsekuensi moral dan politik (Papacharissi, 2010; Ess, 2014). bukan oleh daya pikat atau kalkulasi strategis belaka (Habermas, 1984:101–105).

Dalam kerangka tindakan komunikatif, komunikasi idealnya berorientasi pada pemahaman bersama melalui pengujian klaim validitas (kebenaran, ketepatan normatif, ketulusan, dan keterpahaman). Perspektif ini membantu menilai apakah percakapan digital bergerak ke arah argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan atau justru menjadi tindakan strategis yang mengejar pengaruh semata (Habermas, 1984:99–105; Finlayson, 2005).

Namun, Habermas juga mengingatkan bahwa dunia kehidupan dapat “terkolonisasi” oleh logika sistem (uang/kekuasaan) sehingga komunikasi sehari-hari terdorong menjadi instrumen kontrol dan efisiensi. Dalam konteks digital, distorsi ini tampak ketika metrik keterlibatan dan arsitektur platform mengarahkan visibilitas wacana, sehingga kualitas alasan kalah oleh daya tarik dan viralitas (Habermas, 1987:318–325; Outhwaite, 1994).

Oleh sebab itu, diperlukan pijakan normatif untuk menilai dan memperbaiki komunikasi digital: etika wacana menekankan prosedur diskursif yang inklusif, setara, dan bebas dominasi agar klaim-klaim dapat diuji secara rasional. Artikel ini memfokuskan diri pada upaya menerjemahkan kerangka tersebut menjadi cara membaca praktik komunikasi digital secara etis—sehingga konsep tindakan komunikatif tidak berhenti sebagai teori, tetapi menjadi kriteria evaluatif yang dapat digunakan (Habermas, 1996:107–110, 179–186; McCarthy, 1978).

1.2. Rumusan Masalah

Artikel ini memiliki rumusan masalah utama yang tersusun sebagai pertanyaan payung, berupa: Bagaimana memaknai komunikasi digital secara etis dengan bertolak dari gagasan tindakan komunikatif, empat klaim validitas, dan etika wacana Jürgen Habermas? Kemudian, pertanyaan payung tersebut dipecah ke dalam beberapa pertanyaan turunan yang membedah secara lebih mendalam, antara lain:

- 1.2.0.1. Apa saja kriteria etis komunikasi digital jika dirumuskan dari empat klaim validitas—kebenaran, ketepatan normatif, ketulusan, dan keterpahaman—sehingga mutu komunikasi dapat dipahami sebagai upaya menuju *Verständigung* (pemahaman bersama), bukan sekadar pertukaran informasi atau kalkulasi strategis?
- 1.2.0.2. Bagaimana distorsi komunikatif di ruang digital—misalnya pergeseran dari orientasi pemahaman ke orientasi kontrol/efisiensi—dapat diidentifikasi dan dimaknai melalui pembedaan dunia kehidupan

(*lifeworld*) dan sistem, termasuk gejala kolonisasi yang mengikis rasionalitas komunikatif?

- 1.2.0.3. Pedoman etis apa yang dapat dipelajari dan diterapkan dari etika wacana dan gagasan situasi tutur ideal untuk membimbing praktik komunikasi digital—pada tingkat individu, komunitas, dan institusi—agar proses diskursif berlangsung bebas dominasi, setara, dan berlandaskan daya alasan terbaik?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari artikel ini adalah Merumuskan kerangka pemaknaan etis komunikasi digital berdasarkan gagasan tindakan komunikatif, empat klaim validitas (kebenaran, ketepatan normatif, ketulusan, keterpahaman), serta etika wacana dan situasi tutur ideal Jürgen Habermas, guna menilai dan membimbing praktik komunikasi yang berorientasi pada pemahaman bersama (*Verständigung*) dan bebas dominasi. Dari tujuan umum tersebut kemudian dipecah lagi menjadi beberapa tujuan, antara lain:

- 1.3.0.1. Merumuskan kriteria etis komunikasi digital dengan menurunkan empat klaim validitas—kebenaran, ketepatan normatif, ketulusan, keterpahaman—sebagai tolok ukur mutu komunikasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional.
- 1.3.0.2. Menyusun model diagnosis distorsi komunikatif di ruang digital melalui pembedaan dunia kehidupan—sistem (*lifeworld-system*) dan konsep kolonisasi, untuk menjelaskan pergeseran dari orientasi pemahaman menuju kontrol/efisiensi dalam arsitektur algoritmik.
- 1.3.0.3. Memformalkan etika wacana sebagai pedoman dan instrumen evaluasi, dengan menjadikan situasi tutur ideal sebagai horizon regulatif bagi praktik: prinsip partisipasi setara, kewajiban pemberian alasan (*reason-giving*), mekanisme tanggapan/ banding yang beralasan, serta indikator mutu komunikasi guna menilai keterpenuhan klaim validitas dalam praktik digital

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dipecah menjadi tiga kategori manfaat yang bisa didapatkan, yakni: manfaat teoritis, manfaat metodologis-evaluatif, dan manfaat praktis-desain kebijakan. Secara lebih jelasnya, dapat dilihat di bawah ini:

- 1.4.0.1. Dalam tataran teoritis, manfaat penelitian ini adalah menguatkan fondasi filsafat komunikasi dengan rekonstruksi konseptual atas gagasan Habermas—tindakan komunikatif, empat klaim validitas, etika wacana, serta relasi dunia kehidupan—sistem—dalam konteks komunikasi digital terkini. Hasilnya memperjelas kriteria “komunikasi bermutu” sebagai komunikasi yang berorientasi pada *Verständigung* dan bebas dominasi.
- 1.4.0.2. Tataran metodologis-evaluatif, manfaatnya adalah menyediakan instrumen evaluasi berbasis Habermas untuk menilai praktik komunikasi digital: penurunan empat klaim validitas menjadi indikator yang terukur (misalnya keberadaan alasan, keterbukaan koreksi, kejelasan makna) serta tata cara pengujian kesetaraan partisipasi dan reason-giving dalam proses diskursif. Instrumen ini dapat dipakai peneliti/pendidik untuk audit kualitas wacana pada komunitas, forum, atau mata kuliah terkait etika komunikasi.
- 1.4.0.3. Terakhir, manfaat ini berhubungan dengan praktis-desain yaitu memberi pedoman etis terapan bagi individu, komunitas, dan institusi/platform: prinsip partisipasi setara, kewajiban pemberian alasan, mekanisme tanggapan dan banding yang beralasan, serta rekomendasi desain/aturan yang mendorong rasionalitas komunikatif dan mengurangi dominasi algoritmik. Manfaat ini relevan bagi perumus kebijakan, pengelola platform, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil.

1.5. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan Metode Rekonstruksi–Transendental Dialektis: suatu pendekatan filsafati yang (i) merekonstruksi secara *charitable* konsep-konsep kunci Habermas—tindakan komunikatif, empat klaim validitas, etika wacana—agar argumen pihak lain disajikan dalam bentuknya yang paling kuat dan akurat; (ii) menajamkan makna dengan membedakan ambiguitas dan kekaburan (*vagueness*) sehingga kriteria “komunikasi bermutu” tidak terselip dalam ketidakjelasan istilah; (iii) melakukan eksperimen pikiran dan merancang fiksi berguna sebagai *prototipe normatif* untuk menguji skenario tata kelola komunikasi digital; (iv) menyusun argumen transendental guna menurunkan kondisi-kondisi perlu agar pengajuan dan pengujian klaim validitas mungkin berlangsung tanpa paksaan selain paksaan argumen yang lebih baik; dan (v) mengelaborasi pembacaan dialektis guna memetakan ketegangan antara rasionalitas komunikatif (*lifeworld*)

dan rasionalitas sistem algoritmik/ekonomi-perhatian, lalu menyintesis pedoman etis terapan yang mengurangi dominasi.

Rangkaian ini memanfaatkan alat-alat *Toolkit* berikut: *principle of charity* (Baggini & Fosl, 2010:134–136); pembedaan *ambiguity* ≠ *vagueness* dan relasinya dengan rasionalitas serta bivalensi (Baggini & Fosl, 2010:95–97); *thought experiments* dan *useful fictions* sebagai perangkat pengujian konseptual (Baggini & Fosl, 2010:65–70); *transcendental argument* untuk memperoleh kemenangan bersyarat atas skeptisisme—yakni syarat-mungkin yang harus dipenuhi agar praktik bermakna (Baggini & Fosl, 2010:219–220); serta kerangka dialektika guna membaca oposisi dan sintesis normatif (Baggini & Fosl, 2010:51–53).

Agar terpakai secara praktis setelah artikel dipresentasikan, kerangka filsafati di atas dipadukan dengan dukungan kualitatif interpretatif: pembacaan hermeneutik atas teks-teks primer Habermas untuk rekonstruksi makna dan horizon normatif (Gadamer, 2004:269–307); studi kasus instrumental atas satu konteks ruang diskursif digital—untuk menautkan prinsip ke praksis tanpa menggeneralisasi secara tergesa (Stake, 1995:3–12; Yin, 2009:18–27); analisis wacana kritis guna melihat bagaimana kekuasaan/rasionalitas sistem memformat visibilitas ujaran dan peluang reason-giving (Fairclough, 1995:2–5; 2010:356–378); dan analisis tematik refleksif untuk menata temuan kualitatif ke dalam tema yang memetakan pemenuhan empat klaim validitas (Braun & Clarke, 2006:83–90). Validitas temuan dijaga dengan triangulasi bahan (dokumen kebijakan/moderasi, cuplikan diskusi daring, wawancara kunci) dan keterlacakan alasan—setiap simpulan normatif dirujuk balik ke syarat-syarat diskursus Habermas dan diuji ulang melalui *principle of charity* serta uji transendental tentang kondisi-mungkin rasionalitas komunikatif (Habermas, 1984:99–105; 1996:179–186).

Dengan demikian, metode ini tetap filosofis—karena bergerak di level prasyarat-mungkin dan penjernihan konsep—namun operasional dan hasil akhirnya berupa: (a) matriks kriteria empat klaim validitas untuk membaca praktik komunikasi digital, (b) prototipe normatif berbasis eksperimen pikiran/fiksi berguna sebagai acuan perbaikan kebijakan dan antarmuka, dan (c) sintesis dialektis yang menurunkan pedoman prosedural bebas-dominasi untuk ruang publik digital.

1.6. Tinjauan Pustaka

Ruang publik digital kerap dipahami sebagai perluasan partisipasi warga, namun literatur menunjukkan bahwa kualitas demokratisnya sangat ditentukan oleh arsitektur platform dan norma komunikasinya. Papacharissi (2010) memperkenalkan gagasan “ruang publik terjaringan” yang membuka akses dan ekspresi, tetapi menegaskan bahwa keterbukaan tidak otomatis menghadirkan diskursus yang berorientasi pemahaman; tanpa desain institusional yang mendukung pertukaran alasan, ruang digital mudah bergeser menjadi ajang performativitas dan mobilisasi afektif semata. Implikasi bagi penelitian ini jelas: ruang digital perlu dinilai bukan dari seberapa luas jangkauan pesan, melainkan dari seberapa jauh ia memfasilitasi praktik penalaran bersama sesuai tolok ukur mutu komunikasi.

Sejalan dengan itu, kajian-kajian yang secara eksplisit memakai kerangka Habermas menyoroti jarak antara potensi deliberatif internet dan praktik yang terjadi. Dahlberg (2001; 2007) mengevaluasi forum daring menggunakan kriteria Habermasian—inklusivitas, rasionalitas komunikatif, reflektivitas, dan otonomi dari dominasi—seraya menemukan bahwa logika komersial dan strategi persuasi kerap menggeser *Verständigung*. Namun, ia juga menunjukkan adanya praktik diskursif yang dapat ditopang melalui aturan dan desain yang tepat. Temuan tersebut memperkuat arah artikel ini untuk mengoperasionalkan empat klaim validitas Habermas (kebenaran, ketepatan normatif, ketulusan, keterpahaman) sebagai indikator etis yang dapat dipakai membaca dan membimbing komunikasi digital.

Pada ranah etika normatif, Ess (2014) merumuskan kerangka etika media digital yang menekankan tanggung jawab, transparansi, dan penghormatan atas keutuhan person, seraya menggarisbawahi pentingnya prosedur partisipatif dan “kebajikan dialogis” dalam interaksi daring. Gagasan ini bersenyawa dengan etika wacana Habermas tentang partisipasi setara, keterbukaan alasan (*reason-giving*), serta kebebasan dari paksaan non-argumentatif. Dengan demikian, lintasan penelitian terdahulu menyediakan landasan komplementer bagi artikel ini: Papacharissi (2010) memberi konteks struktural ruang digital, Dahlberg (2001; 2007) menyediakan instrumen evaluatif Habermasian, dan Ess (2014) menegaskan horizon etis praktis. Ketiganya menyokong tujuan artikel untuk memaknai komunikasi digital secara etis melalui rekonstruksi konsep Habermas sekaligus menurunkannya menjadi pedoman evaluatif dan prosedural yang dapat diterapkan.

1.7. Kebaruan Penelitian

Berbeda dari penelitian terdahulu yang umumnya berhenti pada deskripsi potensi dan problem ruang publik digital (Papacharissi), penilaian berbasis kriteria umum Habermasian (Dahlberg), atau horizon etik yang luas (Ess), naskah Anda menawarkan kebaruan pada tiga sisi yang saling terkait. Pertama, naskah memformulasikan celah riset yang spesifik-Habermas—yakni ketiadaan perangkat operasional untuk menerjemahkan empat klaim validitas menjadi indikator mutu komunikasi yang dapat dipakai langsung dalam desain dan tata kelola ruang digital—serta menjadikannya agenda utama kajian, bukan sekadar catatan pinggir (formulasi gap ini dinyatakan eksplisit di naskah). Kedua, naskah tidak hanya mengulang kritik kolonisasi *lifeworld*, tetapi menyajikan rancangan solusi normatif–terapan: memformalkan etika wacana sebagai pedoman dan instrumen evaluasi, dengan menjadikan situasi tutur ideal sebagai horizon regulatif untuk partisipasi setara, kewajiban pemberian alasan, dan mekanisme banding yang beralasan—serta menurunkannya ke indikator penilaian komunikasi digital; ini memindahkan Habermas dari tataran diagnosis ke kerangka evaluatif yang bisa diaudit.

Ketiga, naskah memberi kontribusi kontekstual Indonesia melalui pembacaan kasus dan fenomena lokal sebagai diagnosis distorsi komunikatif—menunjukkan bagaimana klaim kebenaran, ketulusan, dan ketepatan normatif runtuh di bawah logika viralitas—sekaligus memperagakan cara kerja indikator Habermasian di lapangan, sesuatu yang jarang diartikulasikan secara konkret dalam studi-studi sebelumnya.

Di atas fondasi itu, naskah juga menambahkan kebaruan metodologis: Metode Rekonstruksi–Transendental Dialektis yang mengikat rekonstruksi konseptual Habermas dengan instrumen evaluatif bagi praktik komunikasi digital. Rangkaian ini tampak pada perumusan manfaat metodologis—penurunan klaim validitas menjadi indikator terukur dan tata cara pengujian kesetaraan partisipasi/*reason-giving*—serta arahan desain/prosedur untuk mengurangi dominasi algoritmik, yang memperjelas kontribusi praktis naskah di luar tataran refleksi teoretis.

Singkatnya, kebaruan utama artikel ini terletak pada operasionalisasi murni-Habermas (indikator, pedoman, dan mekanisme prosedural) yang dapat dievaluasi dan diadopsi dalam konteks nyata—bukan hanya merumuskan kritik umum atas ruang digital.

1.8. Pernyataan Tesis

Artikel ini berargumen bahwa komunikasi digital hanya dapat dimaknai secara etis jika—dan sejauh—praktiknya memenuhi empat klaim validitas Habermas (kebenaran, ketepatan normatif, ketulusan, keterpahaman) yang diinstitusionalisasikan melalui prosedur diskursif bebas dominasi dalam desain dan tata kelola platform; tanpa prasyarat tersebut, perluasan akses dan jangkauan pesan hanyalah memperdalam kolonisasi dunia kehidupan oleh logika algoritmik.

2. Pembahasan

2.1. Rekonstruksi Konseptual Habermas untuk Komunikasi Digital

Bagian ini merumuskan kembali perangkat konseptual Jürgen Habermas sebagai landasan kerja menafsirkan dan menilai praktik komunikasi digital. Dalam tindakan komunikatif, komunikasi dipahami bukan sebagai transmisi informasi belaka, melainkan sebagai upaya intersubjektif mencapai pemahaman bersama (*Verständigung*) melalui pengajuan dan pengujian klaim-klaim validitas (kebenaran, ketepatan normatif, ketulusan, dan keterpahaman) (Habermas, 1984:99–105). Rasionalitas yang dipertaruhkan di sini adalah rasionalitas komunikatif, yakni daya alasan yang diuji bersama dalam dialog, berbeda dari rasionalitas strategis yang mengejar keberhasilan instrumental (Habermas, 1984:101–105). Dengan kerangka ini, mutu komunikasi digital tidak diukur oleh jangkauan atau keterlibatan (*engagement*), melainkan oleh seberapa dapat dipertanggungjawabkannya klaim-klaim validitas dalam proses dialogis.

Empat klaim validitas memberi kriteria evaluatif yang presisi. (1) Kebenaran (truth) menyangkut kesesuaian proposisi dengan realitas; dalam konteks digital, ini tercermin pada rujukan, verifikasi, dan kesiapan mengoreksi kekeliruan. (2) Ketepatan normatif (*rightness*) menuntut keselarasan dengan norma yang dapat disepakati secara diskursif oleh mereka yang terdampak; dalam praktik platform, hal ini berkaitan dengan kejelasan aturan komunitas dan akses banding beralasan (Habermas, 1996:107–110). (3) Ketulusan (*sincerity*) meminta transparansi posisi dan ketiadaan manipulasi, relevan, misalnya, pada deklarasi konflik kepentingan atau penandaan akun otomatis. (4) Keterpahaman (*comprehensibility*) menuntut bahasa yang jelas dan format yang memfasilitasi penalaran; dalam antarmuka digital, ini menyangkut struktur penyajian argumen agar alasan tidak tenggelam oleh sinyal popularitas (Habermas, 1984:102–105). Bacaan ringkas ini mengikuti penjelasan primer Habermas dan elaborasi sekunder yang menegaskan

empat klaim validitas sebagai prasyarat tindak tutur yang sah (McCarthy, 1978; Finlayson, 2005).

Kerangka ini berakar pada perbedaan antara dunia kehidupan (*lifeworld*)—cadangan makna, nilai, dan solidaritas yang direproduksi lewat komunikasi—dan sistem yang beroperasi melalui media uang dan kekuasaan. Habermas memperingatkan kolonisasi dunia kehidupan ketika logika sistem memasuki praktik komunikatif sehari-hari sehingga orientasi pada pemahaman digeser oleh kontrol dan efisiensi (Habermas, 1987:318–325). Dalam ekosistem digital yang dimediasi algoritme, kolonisasi termanifestasi ketika visibilitas wacana ditentukan oleh metrik perilaku, bukan oleh proses pengujian alasan; akibatnya, yang viral kerap menggeser yang beralasan (Habermas, 1987:322–325). Bacaan sekunder menunjukkan bagaimana kategori *lifeworld–system* membantu mendiagnosis distorsi komunikatif pada platform kontemporer (Baynes, 1992; Outhwaite, 1994).

Sebagai jawaban normatif, Habermas menawarkan etika wacana yang memformulasikan syarat-syarat legitimasi melalui prosedur diskursif bebas dominasi. Dua sendi utamanya ialah prinsip diskursus (D)—bahwa hanya norma yang dapat diterima oleh semua pihak terdampak dalam situasi diskursif yang sah yang berhak mengklaim validitas—dan prinsip universalitas (U)—bahwa konsekuensi penerapan norma mesti dapat diterima oleh semua pihak terkait (Habermas, 1990:120–131; 1996:179–186). Situasi tutur ideal berfungsi sebagai horizon regulatif: bukan keadaan faktual, melainkan standar penuntun untuk menilai apakah suatu praktik komunikasi telah meminimalkan paksaan non-argumentatif, memaksimalkan partisipasi setara, serta membuka ruang pemberian alasan dan keberatan (Habermas, 1996:179–186). Penjelasan ini diperkuat oleh pembacaan sekunder yang menekankan sifat prosedural etika wacana—legitimasi lahir dari cara alasan diuji, bukan dari sumber otoritas eksternal (Cooke, 1994; Rehg, 1994).

Ditarik ke medan digital, rekonstruksi konseptual ini menghasilkan tiga konsekuensi. Pertama, kualitas komunikasi digital harus ditimbang dengan empat klaim validitas sebagai tolok ukur, bukan sekadar metrik keterlibatan. Kedua, relasi *lifeworld–system* memberi lensa untuk mendeteksi kolonisasi algoritmik—yakni saat logika sistem menata perhatian sedemikian rupa hingga menurunkan kapasitas dialogis warga. Ketiga, etika wacana menyediakan arsitektur normatif bagi desain dan tata kelola: prosedur yang memfasilitasi alasan, menjamin kesetaraan partisipasi, dan menyediakan kanal keberatan/ banding beralasan

merupakan syarat legitimasi dalam ruang publik digital (Habermas, 1984:102–105; 1996:107–110,179–186). Dengan fondasi ini, subbab berikut (2.2) mengoperasionalkan empat klaim validitas menjadi indikator etis yang dapat dipakai menilai praktik komunikasi dan menuntun perbaikan institusional.

2.2. Empat Klaim Validitas sebagai Kriteria Etis Komunikasi Digital

Bagian ini menegaskan empat klaim validitas—kebenaran (*truth*), ketepatan normatif (*rightness*), ketulusan (*sincerity*), dan keterpahaman (*comprehensibility*)—sebagai kriteria etis yang melekat pada tindakan komunikatif. Dalam kerangka Habermas, komunikasi bernilai etis hanya sejauh klaim-klaim ini dapat diajukan, diuji, dan dipertanggungjawabkan di bawah prosedur diskursif bebas dominasi yang berorientasi pada *Verständigung* (Habermas, 1984:99–105; 1996:107–110,179–186). Rasionalitas komunikatif—bukan kalkulasi strategis—menjadi ukuran mutu praktik komunikasi, sehingga kualitas percakapan digital tidak dilihat dari luas jangkauan atau derajat *engagement*, melainkan dari ketertataan alasan yang memungkinkan penerimaan atau penolakan yang beralasan (McCarthy, 1978:280–287; Cooke, 1994:41–52). Empat klaim ini bersifat saling-prasyarat: kebenaran tanpa keterpahaman tidak dapat diuji; ketulusan tanpa ketepatan normatif dapat melukai pihak lain; ketepatan normatif tanpa kebenaran terjerembap ke relativisme prosedural. Karena itu, pemaknaan etis komunikasi digital menuntut penilaian terpadu atas keempatnya (Habermas, 1984:102–105; 1996:107–110; Finlayson, 2005:44–50).

2.2.1. Kebenaran (*Truth*)

Klaim kebenaran menautkan ujaran pada dunia objektif melalui bukti, rujukan, dan keterbukaan terhadap koreksi. Secara filosofis, inilah poros yang membedakan penalaran dari retorika murni: tanpa komitmen pada kebenaran, “alasan” turun pangkat menjadi siasat persuasi (Habermas, 1984:102–105). Dalam ekosistem digital, komitmen ini termanifestasi pada kesediaan menyebut sumber, memperlihatkan langkah inferensi, dan merevisi ketika falsifikasi terjadi. Secara normatif, klaim kebenaran memaksa percakapan melampaui “kesan” dan “viralnya wacana”, sebab yang dituntut bukan sekadar diterima khalayak, melainkan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan semua peserta rasional (McCarthy, 1978:280–287). Itulah sebabnya mekanisme *fact-check*, dokumentasi revisi, dan jejak alasan merupakan syarat etis, bukan aksesori teknis. Tidak ada keberatan yang dapat merobohkan klaim ini tanpa menihilkan

komunikasi itu sendiri: jika kebenaran tidak diposisikan sebagai horizon korektif, maka penerimaan atas suatu pernyataan tidak lagi berbeda dari penaklukan oleh kekuatan non-argumentatif—sebuah kontradiksi terhadap maksud komunikasi sebagai pencarian *Verständigung* (Cooke, 1994:41–52).

2.2.2. Ketepatan Normatif (*Rightness*)

Klaim ketepatan normatif mengikat ujaran pada dunia sosial-normati, yaitu suatu praktik komunikatif dianggap sah jika kebijaksanaan yang mengaturnya dapat diterima oleh semua yang terdampak ketika diuji melalui diskursus yang sah (Habermas, 1996:107–110,179–186). Pada ruang digital, hal ini meliputi kejelasan aturan komunitas, penalaran terbuka di balik keputusan moderasi, dan keberadaan kanal banding yang menilai alasan dengan alasan. Secara filosofis, klaim ini menegaskan bahwa legitimasi tidak bersumber dari otoritas pemilik sistem atau statistik popularitas, melainkan dari daya alasan terbaik yang dibuktikan dalam prosedur yang adil—sebuah posisi yang memutuskan kemungkinan “might makes right” dalam wujud algoritmik (Rehg, 1994:79–89). Keberatan bahwa “aturan adalah hak prerogatif platform” batal demi hukum diskursif: begitu aturan menysasar warga yang terdampak, ia masuk ke wilayah klaim legitimasi dan karenanya tunduk pada uji keterterimaan umum. Menolak uji ini berarti melepas klaim legitimasi—dan dengan demikian mengakui praktik yang dijalankan sebagai dominasi, bukan komunikasi (Habermas, 1996:179–186).

2.2.3. Ketulusan (*Sincerity*)

Klaim ketulusan menuntut koherensi antara ujaran, niat, dan keyakinan penutur. Secara normatif, ketulusan menyediakan jaminan performatif bahwa alasan yang ditawarkan bukan kedok manipulasi, sehingga penerimaan atas sebuah klaim tidak diperoleh melalui tipu daya, melainkan kekuatan argumentatifnya (Habermas, 1984:103–105). Dalam komunikasi digital, ketulusan bukan identik dengan menanggalkan anonimitas, melainkan memastikan kecukupan informasi agar pembaca dapat menilai alasan—misalnya penandaan afiliasi, deklarasi potensi konflik kepentingan, atau label “akun terotomasi”. Keberatan bahwa “semua komunikasi adalah permainan peran” tidak membatalkan klaim ini: sekalipun permainan peran diakui, kejujuran komunikatif tetap menjadi standar internal permainan itu—tanpanya, permainan berubah menjadi penipuan

yang mengingkari maksud bersama untuk mencari alasan terbaik (Finlayson, 2005:44–50; Cooke, 1994:63–70). Karena itu, perangkat desain yang menekan *astroturfing* dan mempromosikan deklarasi posisi bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan penerapan langsung dari tuntutan ketulusan.

2.2.4. Keterpahaman (*Comprehensibility*)

Klaim keterpahaman memastikan bahwa bentuk linguistik ujaran—pilihan istilah, struktur argumen, dan format penyajian—memungkinkan alasan dipahami, diuji, dan disanggah. Secara filosofis, inilah syarat kebahasaan paling dasar: tanpa keterpahaman, klaim kebenaran, ketepatan normatif, dan ketulusan kehilangan arena untuk diuji; komunikasi runtuh menjadi kebisingan yang tak dapat dievaluasi (Habermas, 1984:99–102). Di ruang digital, ini menuntut struktur antarmuka yang menonjolkan klaim–alasan–bukti–sanggahan, ringkasan argumen untuk wacana panjang, serta keteracakan sitasi. Keberatan bahwa “format singkat membuat alasan mustahil” dapat dipatahkan: keterpahaman tidak menuntut panjang, melainkan proposisionalitas minimal yang memungkinkan kritik—dan itu dapat diakomodasi dengan prompt alasan singkat, tautan rujukan, atau penanda struktur argumentatif (Cooke, 1994:63–70). Mengabaikan klaim ini berarti menutup pintu bagi evaluasi rasional dan, pada akhirnya, mengundang dominasi sinyal sosial atas isi alasan—sebuah bentuk kolonisasi yang diam-diam namun pasti (Habermas, 1987:322–325).

Dengan demikian, empat klaim validitas membentuk kompas normatif tunggal bagi pemaknaan etis komunikasi digital. Ia tidak menawarkan daftar cek administratif, melainkan prasyarat rasionalitas komunikatif yang menjadikan penerimaan atas suatu klaim berbeda secara normatif dari kepatuhan karena paksaan. Menanggalkan salah satunya meruntuhkan keseluruhan bangunan diskursus: kebenaran tanpa keterpahaman tak bisa diuji; ketepatan normatif tanpa kebenaran hanyalah kesepakatan kosong; ketulusan tanpa keduanya menjadi sentimentalitas; keterpahaman tanpa orientasi kebenaran dan norma berubah menjadi kejernihan formal yang nihil isi (Habermas, 1984:99–105; 1996:107–110). Inilah dasar mengapa, dalam konteks digital, keberhasilan etis suatu percakapan ditakar bukan oleh viralitas, melainkan oleh keterpenuhan terpadu keempat klaim validitas—sebuah standar yang memindahkan penilaian dari yang populer menuju yang beralasan.

2.3. Rasionalitas Komunikatif vs. Rasionalitas Sistem: Diagnosis Distorsi

Subbab ini menelaah pertarungan halus antara rasionalitas komunikatif—yang berorientasi pada pencapaian *Verständigung* melalui pengajuan dan pengujian klaim validitas—dan rasionalitas sistem—yang diatur oleh media uang dan kekuasaan serta berorientasi pada kontrol, efisiensi, dan keberhasilan instrumental (Habermas, 1984:101–105; Habermas, 1987:318–325). Dalam pembacaan Habermas, keduanya tidak niscaya saling meniadakan: sistem diperlukan untuk menstabilkan kompleksitas masyarakat modern, sementara dunia kehidupan (*lifeworld*) memelihara cadangan makna, solidaritas, dan legitimasi normatif. Distorsi muncul ketika logika sistem mengkonsumsi ruang-ruang yang semestinya ditopang oleh rasionalitas komunikatif—sebuah proses yang ia namai kolonisasi dunia kehidupan (Habermas, 1987:322–325). Diagnosis distorsi, karenanya, bukan sekadar menuding “ada kepentingan ekonomi”: ia menelusuri momen transisi saat orientasi pada alasan digeser oleh logika metrik dan kontrol hingga komunikasi kehilangan sifatnya sebagai praktik pembenaran intersubjektif (McCarthy, 1978:282–287; Outhwaite, 1994:57–66).

Dalam konteks digital kontemporer, mekanisme kolonisasi bekerja melalui perantara algoritmik yang mengelola visibilitas wacana. Ketika *feed* dan rekomendasi memprioritaskan sinyal perilaku—klik, tayangan, waktu tonton—atas sinyal alasan, maka pertemuan diskursif publik cenderung dipandu oleh probabilitas keterlibatan, bukan oleh kekuatan justifikasi. Pada titik ini, rasionalitas sistem “menggantikan” kerja penalaran bersama: konten yang paling terlihat bukan lagi yang paling dapat dipertanggungjawabkan secara klaim validitas, melainkan yang paling mengundang respons (Habermas, 1987:322–325). Secara filosofis, inilah momen ketika tindak tutur kehilangan dimensi *justificatory*-nya dan merosot menjadi strategi—meski tetap dikemas dalam bentuk ujaran yang tampak dialogis (Cooke, 1994:41–52; Baynes, 1992:145–153). Distorsi makin mengental ketika keputusan moderasi dan penataan perhatian tidak disertai alasan yang dapat ditinjau publik, sehingga warga diposisikan sebagai penerima kebijakan, bukan sebagai partisipan diskursus yang berhak mengajukan keberatan beralasan (Habermas, 1996:107–110, 179–186; Rehg, 1994:79–89).

Diagnosis distorsi dapat dirumuskan ke dalam tiga gejala kunci. Pertama, substitusi metrik atas alasan: keberhasilan ujaran diukur oleh capaian keterlibatan, bukan oleh pemenuhan klaim-klaim validitas; akibatnya, *reward structure* mendorong tindakan strategis (memicu emosi, memanipulasi sinyal sosial) alih-alih tindakan komunikatif (Habermas, 1984:101–105; McCarthy, 1978:283–

287). Kedua, opasitas prosedural: keputusan yang memengaruhi siapa berbicara, kapan, dan seterusnya apa—moderasi, *downranking*, *deplatforming*—tidak disertai pemberian alasan yang dapat diuji, sehingga klaim ketepatan normatif kehilangan arena pengujian dan warga kehilangan hak *reason-demanding* (Habermas, 1996:107–110; Reh, 1994:79–89). Ketiga, erosi prasyarat kebahasaan: format antarmuka dan ekonomi perhatian mendorong kependekan atau fragmentasi wacana yang membenamkan struktur klaim–alasan–sanggahan, sehingga keterpahaman menurun dan diskursus beralih ke sinyal permukaan (Habermas, 1984:99–102; Cooke, 1994:63–70). Ketiga gejala ini saling memperkuat: ketika alasan menghilang, opasitas tampak wajar; ketika opasitas meningkat, warga semakin mengandalkan sinyal sosial; ketika sinyal sosial naik daun, insentif strategis menguat—sebuah lingkaran kolonisasi yang stabil.

Dikarenakan kolonisasi bersifat prosedural dan struktural, pemulihannya memerlukan rekonstruksi normatif yang mengembalikan prioritas rasionalitas komunikatif tanpa menafikan peran sistem. Habermas menyediakan arsitektur pemulihan melalui etika wacana dan situasi tutur ideal: legitimasi praktik komunikasi—termasuk kebijakan algoritmik—bergantung pada prosedur bebas dominasi yang membuka pemberian alasan, akses keberatan, dan koreksi publik (Habermas, 1996:179–186). Dengan horizon ini, diagnosis distorsi bukan akhir, melainkan undangan untuk mendesain ulang: bagaimana *feed* mengedepankan sinyal alasan (rujukan, ringkasan argumen, histori revisi), bagaimana moderasi selalu disertai alasan serta jalur banding, dan bagaimana antarmuka menstrukturkan percakapan agar klaim–alasan–sanggahan terbaca jelas. Pendeknya, menormalisasi penalaran sebagai logika operasi ruang digital berarti menempatkan kembali komunikasi dalam rumahnya: dunia kehidupan yang hidup oleh alasan, bukan sekadar oleh angka (Habermas, 1987:318–325; Finlayson, 2005:44–50; Dahlberg, 2007:829–835).

2.4. Formulasi Pedoman Desain dan Tata Kelola Bebas Dominasi

Bagian ini merumuskan pedoman desain dan tata kelola yang menurunkan etika wacana Habermas ke dalam praktik ruang publik digital. Prinsip utamanya sederhana: kebijakan dan antarmuka sah sejauh memfasilitasi pengajuan serta pengujian klaim validitas secara bebas dominasi—yakni memberi tempat bagi kebenaran, ketepatan normatif, ketulusan, dan keterpahaman untuk bekerja sebagai kompas percakapan (Habermas, 1984:99–105; 1996:107–110, 179–186). Karena legitimasi lahir dari prosedur diskursif, bukan dari itikad baik

pengelola atau statistik popularitas, maka pedoman di bawah ini mengikat desain UI/UX, moderasi, dan kebijakan algoritmik pada daya alasan terbaik (Cooke, 1994:41–52; Reh, 1994:79–89).

Pertama, normakan pemberian alasan di titik-titik krusial percakapan. Pada level pengguna, antarmuka perlu mendorong “pernyataan tesis singkat + alasan + rujukan” agar klaim kebenaran dan keterpahaman terlihat dan ditinjau; pada level institusi, setiap keputusan yang memengaruhi visibilitas ujaran—penandaan, *downranking*, *removal*—wajib disertai alasan tertulis yang dapat ditinjau publik, sehingga klaim ketepatan normatif memperoleh arena pengujian. Kewajiban *reason-giving* ini bukan beban administratif, melainkan syarat minimal agar komunikasi tetap komunikatif—yakni bisa dipertanyakan dan dibenarkan oleh siapa pun yang terdampak (Habermas, 1996:107–110; McCarthy, 1978:280–287).

Kedua, pastikan hak “menuntut alasan” (*reason-demanding*) dan hak banding beralasan benar-benar dapat digunakan. Kanal keberatan harus memeriksa alasan dengan alasan, bukan sekadar menutup tiket; hasil banding mesti merekam pertimbangan argumen dan membuka kemungkinan revisi, sejalan dengan sifat fallibilis diskursus. Tanpa revisibilitas institusional, etika wacana kehilangan giginya dan moderasi kembali ke otoritas sepihak—persis bentuk dominasi yang hendak dihindari (Habermas, 1990:120–131; 1996:179–186; Reh, 1994:90–98).

Ketiga, strukturkan percakapan agar keterpahaman diutamakan. Alih-alih menonjolkan sinyal popularitas, antarmuka perlu mengangkat struktur argumen: klaim, alasan, bukti, sanggahan, dan klarifikasi. Ringkasan argumentatif pada unggahan panjang, penanda rujukan yang dapat dilacak, serta histori revisi yang terbuka membantu publik menilai alasan alih-alih mengejar isyarat sosial. Langkah ini mengembalikan rasionalitas komunikatif ke pusat, seraya mengurangi peluang “kolonisasi” oleh metrik perilaku (Habermas, 1984:99–105; 1987:322–325; Cooke, 1994:63–70).

Keempat, institusionalkan ketulusan tanpa mengorbankan keselamatan. Ketulusan bukan desakan membuka identitas, melainkan kejujuran komunikatif yang relevan untuk menilai argumen: penandaan afiliasi, deklarasi potensi konflik kepentingan, dan label atas operasi otomatis/terbantu AI. Dengan cara ini, penerimaan atas klaim tidak jatuh pada tipu daya atau astroturfing, tetapi berdiri di atas transparansi yang cukup untuk memungkinkan evaluasi publik (Habermas, 1984:103–105; Finlayson, 2005:44–50).

Kelima, tarik pihak yang terdampak ke dalam perumusan kebijakan. Karena validitas norma ditentukan oleh penerimaan diskursif mereka yang hidup di bawahnya, proses penyusunan aturan komunitas dan perubahan kebijakan perlu memfasilitasi keterlibatan bermakna: konsultasi publik terstruktur, panel warga, atau forum banding kebijakan yang merekam alasan dan jawabannya. Ini bukan aksesori partisipatif, melainkan konsekuensi langsung dari Prinsip Diskursus (D) dan Prinsip Universalitas (U) (Habermas, 1990:120–131; 1996:179–186; Baynes, 1992:145–153).

Keenam, letakkan algoritme di bawah terang alasan. Jika pengurutan dan rekomendasi membentuk apa yang terlihat dan tak terlihat, maka ia wajib tunduk pada standar justifikasi publik: nyatakan tujuan normatifnya (misalnya memajukan konten beralasan), jelaskan kriteria yang digunakan, sediakan mekanisme penjelasan keputusan kasus-per-kasus yang proporsional, dan buka ruang koreksi bila kriteria terbukti menurunkan peluang *Verständigung*. Dengan demikian, code berhenti menjadi “otoritas bisu” dan berubah menjadi bagian dari ruang diskursus yang dapat ditantang secara rasional (Habermas, 1996:107–110; Cooke, 1994:41–52).

Akhirnya, uji setiap pedoman dengan dua saringan: (i) uji transendental—apakah pedoman ini merupakan syarat-mungkin bagi pengujian empat klaim validitas?—dan (ii) uji diskursus—apakah pedoman ini dapat diterima oleh semua pihak terdampak dalam prosedur yang sah? Jika lulus keduanya, pedoman tersebut memiliki klaim legitimasi; jika tidak, seberapa pun efektif di mata metrik, ia gagal secara etis karena menempatkan popularitas atau prerogatif di atas daya alasan (Habermas, 1990:120–131; 1996:179–186; Baggini & Fosl, 2010:219–220). Dengan pedoman ini, ruang publik digital dapat bergerak dari yang sekadar ramai menuju yang beralasan, mengikat desain dan tata kelola pada rasionalitas komunikatif sebagai prinsip operasi bersama.

2.5. Aplikasi pada Konteks Studi Kasus: Diskursus Digital atas Kebijakan Tarif “Resiprokal” AS–Indonesia (2025)

Bagian ini menerapkan kerangka Habermas pada perdebatan publik di jagat maya mengenai kebijakan tarif “resiprokal” Amerika Serikat terhadap Indonesia yang diumumkan pada 2025. Perdebatan tersebut mempertemukan beragam perspektif—ekonomi, hukum dagang, kepentingan industri, perlindungan konsumen, hingga politik luar negeri—yang kerap berbenturan karena beroperasi

dengan logika yang berbeda-beda. Tujuan subbab ini adalah menata perdebatan agar berpindah dari sekadar pertukaran opini menuju praktik diskursif yang memungkinkan pengujian empat klaim validitas (kebenaran, ketepatan normatif, ketulusan, keterpahaman) dalam kerangka rasionalitas komunikatif (Habermas, 1984:99–105; 1996:107–110, 179–186).

2.5.1. Proses Pertama: Menata Arena Diskursif Berbasis Alasan

Proses awal menata arena diskursif berangkat dari penetapan format alasan minimal bagi setiap kontribusi: setiap unggahan wajib menyertakan tesis yang jelas, alasan kunci yang relevan, serta rujukan yang dapat diperiksa (dokumen resmi, data primer, atau analisis tepercaya). Penataan ini memastikan klaim kebenaran dan keterpahaman dapat diuji tanpa mengorbankan kecepatan arus percakapan (Habermas, 1984:101–105). Setelah itu, kanal dibedakan secara fungsional menjadi kanal fakta—yang menampung kronologi, besaran tarif, cakupan produk, dan status instrumen dagang—serta kanal kebijakan—yang menampung argumentasi pro–kontra, pertimbangan keadilan, dan implikasi lintas-sektor. Pemisahan ini mencegah pencampuran bukti dengan opini sehingga klaim kebenaran dan ketepatan normatif dapat dibaca jernih (Habermas, 1996:107–110).

Seluruh tindakan moderasi (penandaan, penurunan, atau penghapusan) wajib disertai alasan tertulis yang menaut pada kaidah komunitas dan disediakan jalur banding yang menilai alasan dengan alasan, bukan prosedur administratif semata—dengan demikian klaim ketepatan normatif diinstitusikan melalui prosedur yang sah (Habermas, 1996:107–110). Lebih lanjut, kurasi/peringkat konten dibuat transparan: unggahan yang memiliki struktur alasan jelas serta rujukan primer diprioritaskan tampil, sedangkan opini yang bersifat spekulatif diberi penanda “belum terverifikasi”. Tata kelola ini menahan dominasi metrik popularitas atas alasan dan mengembalikan rasionalitas komunikatif sebagai prinsip operasi ruang diskursif (Habermas, 1984:101–105). Terakhir, audit berkala dilakukan—misalnya setiap dua hingga tiga pekan—untuk menilai *justification rate* (proporsi unggahan beralasan), *correction uptake* (kesiapan melakukan koreksi), dan *reason-based ranking effect* (apakah konten beralasan lebih terlihat); hasilnya menjadi dasar penyempurnaan prosedur (Habermas, 1996:179–186).

2.5.2. Proses Kedua: Pengujian Validitas Klaim Substansial

Pengujian validitas klaim substantif memastikan wacana tidak terseret viralitas atau kepentingan sesaat. Pertama, akurasi cakupan dan besaran tarif diperiksa melalui rujukan primer; klaim menyeluruh—misalnya “semua produk terkena tarif”—dinilai cacat apabila mengabaikan pengecualian, fase penerapan, atau instrumen dagang yang berjalan paralel; di sini kekuatan wacana ditentukan oleh verifikasi, bukan gaung semata (Habermas, 1984:101–105). Kedua, istilah “resiprokal” tidak dapat serta-merta disamakan dengan adil; simetri angka belum tentu simetri beban. Keberterimaan publik menuntut justifikasi yang dapat diterima oleh semua pihak terdampak—pelaku UKM, pekerja/petani, asosiasi industri, dan konsumen—melalui prosedur diskursif yang setara (Habermas, 1996:107–110). Ketiga, viralitas tidak menggantikan alasan: kampanye digital harus menyatakan afiliasi atau kepentingan relevan (dimensi ketulusan) dan menyajikan argumen terstruktur (dimensi keterpahaman), agar publik dapat menilai klaim tanpa tertipu oleh insentif performatif (Habermas, 1984:103–105). Keempat, dampak lintas ranah harus dipetakan dengan membedakan logika sistem (kebijakan, ekonomi-perhatian) dan dunia kehidupan (makna, solidaritas, nafkah); kebijakan sah sejauh alasan penerapannya dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka yang menanggung konsekuensi, sehingga klaim ketepatan normatif diuji pada aras konkret (Habermas, 1987:318–325).

2.5.3. Proses Ketiga: Dari Diskursus ke Rekomendasi Kebijakan yang Dapat Diaudit

Penyulingan hasil diskursus ke rekomendasi operasional dilakukan melalui beberapa langkah yang saling terkait. Mula-mula disusun ringkasan publik satu halaman yang memetakan apa yang telah diketahui dan belum diketahui: status kebijakan, cakupan, kemungkinan pengecualian/penyesuaian, dan isu yang masih diperdebatkan; dokumen ini menguatkan klaim keterpahaman dan mencegah disinformasi teknis (Habermas, 1984:99–102). Selanjutnya, lembaga atau komunitas mengadopsi protokol pemberian alasan (*reason-giving*): setiap perubahan posisi/kebijakan internal disertai alasan tertulis dan rujukan; serta disediakan kanal banding yang menilai argumen secara substantif—memformalkan klaim ketepatan normatif dalam tata kelola (Habermas, 1996:107–110).

Di tingkat kurasi, penataan atensi mendahulukan konten dengan rujukan primer dan struktur argumen (tesis—alasan—bukti—sanggahan), sementara konten

spekulatif diberi label “sementara” berikut masa telaah. Lalu, keterlibatan pihak terdampak diwujudkan melalui forum dengar pendapat yang terdokumentasi—keberatan dan sanggahan dicatat bersama rasionalitas revisinya—sebagai penerapan Prinsip Diskursus–Universalitas (Habermas, 1990:120–131; 1996:179–186). Terakhir, evaluasi dan revisibilitas dijalankan dengan indikator seperti justification rate, correction uptake, dan policy clarity; revisi tidak dianggap kelemahan, melainkan konsekuensi komitmen pada paksaan argumen yang lebih baik (Habermas, 1996:179–186).

2.5.4. Catatan Reflektif: Dari “Angka Tarif” ke Legitimasi Diskursus

Perdebatan tarif mudah terseret oleh angka dan kepentingan jangka pendek; namun, dalam kerangka Habermas, legitimasi kebijakan dalam ruang publik digital lahir dari prosedur—yakni dari bagaimana alasan diajukan, diuji, direspons, dan direvisi—bukan dari popularitas narasi atau kewenangan pembuatnya. Dengan menata format alasan, pemisahan kanal, moderasi beralasan, kurasi berbasis justifikasi, serta partisipasi pihak terdampak, komunitas digital diarahkan untuk bergerak dari keramaian menuju keterbertanggungjawaban. Inilah jalan agar Verständigung menjadi mungkin: bukan keseragaman pendapat, melainkan penerimaan sementara yang beralasan, siap direvisi ketika argumen yang lebih kuat muncul (Habermas, 1984:99–105; 1996:179–186).

3. Penutup

3.1. Kesimpulan

Komunikasi digital bermutu, dalam horizon Habermas, tidak ditakar oleh luas sebaran melainkan oleh sejauh mana percakapan memfasilitasi pengajuan dan pengujian bersama atas kebenaran, ketepatan normatif, ketulusan, dan keterpahaman dalam prosedur bebas paksaan non-argumentatif. Tatkala arsitektur algoritmik dan ekonomi perhatian menukar daya alasan dengan sinyal popularitas, terjadi kolonisasi dunia kehidupan: wacana tampak ramai, namun legitimasi dan solidaritas melemah. Sebagai koreksi normatif, kerangka tindakan komunikatif dan etika wacana menempatkan rasionalitas komunikatif sebagai patokan sekaligus perangkat pembenahan distorsi, dengan menautkan kebijakan serta antarmuka pada “paksaan argumen yang lebih baik” melalui operasionalisasi murni-Habermas: indikator etis dan instrumen evaluatif—kewajiban reason-giving, hak menuntut alasan dan banding beralasan, serta

pengujian keterpahaman—serta desain kurasi berbasis justifikasi, penjelasan keputusan moderasi/rekomendasi, dan penataan UI yang menonjolkan struktur klaim–alasan–bukti–sanggahan.

Kontribusi metodologis diwujudkan melalui Metode Rekonstruksi–Transendental Dialektis yang mengikat penjernihan konsep, eksperimen pikiran/fiksi berguna, argumen syarat-mungkin, dan pembacaan dialektis dengan dukungan kualitatif (hermeneutik, studi kasus, analisis wacana, dan tematik), menghasilkan matriks indikator, prototipe normatif, serta prosedur evaluasi yang dapat diaudit dan direvisi (mis. justification rate, correction uptake). Aplikasi pada kasus kebijakan tarif AS–Indonesia menunjukkan bagaimana tata kelola berbasis alasan menggeser perdebatan dari keramaian menuju keterbertanggungjawaban. Prinsip akhirnya tegas: sejauh platform dan kebijakan memperbesar peluang alasan terbaik mengemuka dan diterima secara adil, sejauh itu pula klaim mutu etisnya sah; sementara keterbatasan—kebutuhan kalibrasi kontekstual dan kompromi pragmatis antara keselamatan, privasi, dan transparansi—membuka agenda lanjutan berupa uji lapangan indikator, eksperimen antarmuka berbasis alasan, dan audit algoritmik yang konsisten dengan syarat-mungkin rasionalitas komunikatif.

3.2. Saran

Sebagai pengembangan teoretis atas kerangka Habermas yang telah dipakai—dengan pusat pada rasionalitas komunikatif, empat klaim validitas, dan etika wacana—horizon omniparsialitas dapat diajukan sebagai perluasan epistemologis yang tetap kompatibel dengan proseduralisme diskursif. Jika etika wacana menuntut imparsialitas melalui partisipasi setara dan pemberian alasan yang dapat diuji, maka omniparsialitas menambah satu lapis abstrak: mewajibkan penimbangan dari sebanyak mungkin sudut pandang yang relevan, termasuk ekspresi non-proposisional (narasi, afek, pengetahuan lokal) sebagai bahan mentah yang kemudian ditransformasikan ke bentuk yang dapat diuji publik. Dengan demikian, ia tidak menggantikan klaim validitas, tetapi memperluas daerah input tanpa merusak inti justifikatif Habermas.

Potensinya bagi etika komunikasi digital terletak pada tiga hal. Pertama, penguatan basis legitimasi: keputusan yang lahir dari cakupan perspektif yang lebih luas memiliki daya terima yang lebih kokoh karena prosesnya mengatasi “bisu epistemik” atas kelompok rentan, sembari tetap berujung pada pengujian alasan. Kedua, dekonstruksi kolonisasi atensi: ketika algoritme dan tata kelola

diwajibkan memproses ragam suara sebagai calon-alasan (bukan noise), ekonomi perhatian dipaksa bergeser dari metrik popularitas menuju kurasi prasyarat justifikasi, sehingga perhatian menjadi fungsi potensi alasan, bukan sekadar gaung. Ketiga, ketahanan normatif: pluralitas jalan-pengetahuan membuat diskursus lebih tahan terhadap reduksionisme rasionalitas strategis, karena setiap klaim melewati dua gerbang—penerjemahan lintas modus (dari narasi/afek ke proposisi evaluabel) dan pengujian lintas klaim validitas. Secara abstrak, omniparsialitas dapat dipahami sebagai ide regulatif meta-prosedural di atas etika wacana: ia memperluas siapa dan bagaimana sesuatu boleh masuk ke meja diskursus, sementara etika wacana tetap menentukan kapan sesuatu sah keluar sebagai norma. Dengan kombinasi ini, etika komunikasi digital memperoleh jangkauan inklusi yang lebih luas tanpa terjerumus ke relativisme, sebab titik akhirnya tetap penerimaan beralasan—hanya saja jalan menuju alasan sengaja diperlebar.

Daftar Referensi

- Baggini, J., & Fosl, P. S. (2010). *The philosopher's toolkit: A compendium of philosophical concepts and methods* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.
- Baynes, K. (1992). *The normative grounds of social criticism: Kant, Rawls, and Habermas*. State University of New York Press.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Cooke, M. (1994). *Language and reason: A study of Habermas's pragmatics*. MIT Press.
- Dahlberg, L. (2001). The Internet and democratic discourse: Exploring the prospects of online deliberative forums extending the public sphere. *Information, Communication & Society*, 4(4), 615–633.
- Dahlberg, L. (2007). Rethinking the fragmentation of the cyberpublic: From consensus to contestation. *New Media & Society*, 9(5), 827–847.
- Ess, C. (2014). *Digital media ethics* (2nd ed.). Polity.
- Fairclough, N. (1995). *Critical discourse analysis: The critical study of language*. Longman.

- Fairclough, N. (2010). *Critical discourse analysis: The critical study of language* (2nd ed.). Pearson/Longman.
- Finlayson, J. G. (2005). *Habermas: A very short introduction*. Oxford University Press.
- Gadamer, H.-G. (2004). *Truth and method* (2nd rev. ed., J. Weinsheimer & D. G. Marshall, Trans.). Continuum.
- Habermas, J. (1984). *The theory of communicative action, Volume 1: Reason and the rationalization of society* (T. McCarthy, Trans.). Beacon Press.
- Habermas, J. (1987). *The theory of communicative action, Volume 2: Lifeworld and system—A critique of functionalist reason* (T. McCarthy, Trans.). Beacon Press.
- Habermas, J. (1990). *Moral consciousness and communicative action* (C. Lenhardt & S. W. Nicholsen, Trans.). MIT Press.
- Habermas, J. (1996). *Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy* (W. Rehg, Trans.). MIT Press.
- McCarthy, T. (1978). *The critical theory of Jürgen Habermas*. MIT Press.
- Outhwaite, W. (1994). *Habermas: A critical introduction*. Polity Press.
- Papacharissi, Z. (2010). *A private sphere: Democracy in a digital age*. Polity.
- Rehg, W. (1994). *Insight and solidarity: The discourse ethics of Jürgen Habermas*. University of California Press.
- Stake, R. E. (1995). *The art of case study research*. Sage.
- Yin, R. K. (2009). *Case study research: Design and methods* (4th ed.). Sage.